PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA

Faisal Mochsen¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

^{1,2}Program Studi D-III Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Jurang
Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia

*Email: sprnwijaya@pknstan.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan mengetahui kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara dilakukan melalui beberapa program yakni meliputi kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan, dan kegiatan pembinaan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajaknya. Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan bersifat final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, Pajak penghasilan final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA MALANG UTARA

Abstract

The purpose of this study is to explain the application of Government Regulation Number 23 of 2018, to find out the level of compliance of taxpayers who have a certain gross turnover, and to find out the contribution of tax revenues from taxpayers who have a certain gross turnover before and after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 on revenue. final income tax at the North Malang Primary Tax Service Office. The research method used is descriptive qualitative. The result of the research is that the application of Government Regulation Number 23 of 2018 at the North Malang Tax Service Office is carried out through several programs which include socialization activities, supervision activities, and coaching activities. The application of Government Regulation Number 23 of 2018 does not have much effect on the level of compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers at the North Malang Pratama Tax Service Office, in this case the tax payment compliance. The realization of final income tax receipts at the North Malang Pratama Tax Service Office in the last five years has always changed or fluctuated.

Keywords: Final Income Tax, Tax Compliance, Government Regulation Number 23 of 2018, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Article History: Received: 16 Agt 2021 Revised: 13 Okt 2021 Accepted: 27 Okt 2021

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat kepada negara yang kemudian dari pungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Hal ini tercermin dalam realisasi pendapatan negara tahun 2019 seperti yang dilansir dari laman kemenkeu.go.id, pendapatan pajak sebesar Rp1.545,3 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.957,2 triliun pada tahun tersebut. Berdasarkan data realisasi penerimaan negara dalam APBN, dapat kita ketahui bahwa pajak memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara, bahwa di tahun 2018 penerimaan perpajakan menyumbang sebesar 78,33% terhadap realisasi pendapatan negara, demikian pula di tahun 2019 dan 2020 yakni realisasi sementara penerimaan pajak menyumbang sebesar 78,95% dan 78,53% terhadap pendapatan negara di tahun tersebut. Hal ini membuat pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, dan untuk menunjang penerimaan pajak tersebut dibutuhkan kepatuhan dari para wajib pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aksi dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak perpajakan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadmi, 2016). Sehubungan dengan itu, Mukhlis (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 sampai tahun 2019, presentase realisasi kepatuhan wajib pajak berhasil melewati target yang ditetapkan. Data target dan realisasi

kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Presentase Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Uraian	Target	Realisasi
2017	Tingkat Kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%
2018	Kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%
2019	Kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	60%	62,08%
	Tingkat Kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	70%	72,52%

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, pemerintah melakukan berbagai cara yang salah satunya adalah mengeluarkan atau menyederhanakan peraturan terkait perpajakan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan potensi pajak yang ada dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu contoh nyatanya adalah pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak 1% atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Secara tidak langsung yang menjadi sasaran dari peraturan ini adalah UMKM yang dimiliki oleh perorangan atau badan dengan peredaran bruto dibawah 4,8 Miliar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang diperhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2013 jumlah UMKM yang beroperasi di Indonesia mencapai 57,8 juta unit, dimana pada tahun tersebut sumbangan produk domestik bruto UMKM adalah sebesar Rp5.440 triliun atau sebesar 60,34%. Sehubungan dengan itu, jumlah UMKM di tahun 2018 adalah 64,1 juta unit dengan sumbangannya terhadap PDB sebesar Rp8.573,8 triliun atau sebesar 61,07%. Melihat dari banyaknya jumlah UMKM dari tahun ke tahun dan kontribusinya yang cukup besar bagi PDB, hal inilah yang membuat pemerintah melakukan suatu kebijakan dengan menerbitkan PP 46 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong kontribusi UMKM pada negara terutama dalam hal perpajakan.

Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peningkatan jumlah UMKM di tiap daerahnya, salah satunya adalah daerah Kota Malang. Perkembangan UMKM di Kota Malang juga dapat terbilang signifikan karena Kota Malang sendiri yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dan merupakan kota pendidikan, selain itu Kota Malang juga adalah kota dengan banyak kuliner dan harganya yang terjangkau. Sehingga banyak pelaku UMKM yang membuka usaha di kota ini, khususnya UMKM kuliner. Selain di bidang kuliner, terdapat juga di bidang fashion sampai kerajinan tangan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di Kota Malang adalah sebesar 117.840 dari hasil SUTAS 2018 sebesar 6.828 untuk sektor pertanian dan hasil Sensus Ekonomi 2016 sebesar 111.012 untuk sektor non pertanian. Banyaknya UMKM tersebut tentu tidak

hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah tapi juga dapat menjadi potensi dalam hal perpajakan, sehingga diperlukan peraturan khusus yang mengaturnya.

Dalam penerapannya, PP 46 Tahun 2013 ini ternyata memiliki kekurangan karena ketika UMKM mengalami kerugian, ia tetap akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari omset dan hal ini membuat para pelaku UMKM merasa keberatan. Sehingga dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi para pelaku UMKM dalam hal perpajakannya, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pertengahan tahun 2018 lalu. Peraturan ini diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu perubahan penting dalam peraturan ini adalah penurunan tarif menjadi 0,5% dari yang sebelumnya 1% dari omzet. Selain itu, PP 23 ini lebih adil karena bersifat opsional sehingga apabila wajib pajak UMKM melakukan pembukuan maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak.

Penerbitan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bagi negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah penerimaan pajak sektor UMKM tahun 2018 hanya sebesar Rp.5,7 triliun, padahal total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan pada tahun tersebut adalah Rp135,93 triliun, hal ini berarti kontribusi dari UMKM hanya 0,43%-nya saja (Consulting, 2019). Sehingga secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau kepatuhan pajak UMKM masih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak dapat menjadi salah

satu indikator seberapa besar pengaruh penerapan PP No.23 Tahun 2018.

Dalam penelitian terdahulu (Cahyani & Noviari, 2019), menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, begitu pun dengan pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan yang juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Dalam penulisan ini, penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dari sisi penerapan peraturan perpajakan khususnya sebelum dan sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia secara umum dan di Kota Malang secara khusus serta kontribusi UMKM terhadap pajak yang masih rendah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan PP No.23 Tahun 2018 di KPP Malang Utara, mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.23 Tahun 2018 di KPP Malang Utara, dan mengetahui kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak penghasilan final di KPP Pratama Malang Utara.

LANDASAN TEORI

Pajak

Selain dari Undang-Undang, pengertian pajak juga dikemukakan oleh para ahli. Kansil (1986: 324, dikutip dalam Utara, 2011) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Kemudian menurut Pohan (2013, dikutip dalam Marfiana, 2019) pajak adalah pungutan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dan tanpa imbalan langsung dari pemerintah.

Fungsi Pajak

Mustaqiem (2014) menjelaskan bahwa beberapa fungsi dari pajak, yaitu *budgetair*, *regulerend*, stabilitas, redistribusi dan pendapatan. Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai setiap pengeluaran negara. Untuk menjalankan semua tugas negara termasuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebijakan-kebijakan pajaknya. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Fungsi stabilitas, dengan hadirnya pajak dalam suatu negara, suatu pemerintahan dapat memiliki dana yang dapat digunakan dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga kondisi seperti inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi dan pendapatan, pemungutan pajak yang

telah dilakukan oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembiayaan dalam hal pembangunan sehingga hal tersebut dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat diartikan sebagai cara mengenai bagaimana pengelolaan suatu utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat disetorkan ke kas negara (Utara, 2011). Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak kepada pihak ketiga yang tidak termasuk wajib pajak ataupun petugas pajak atau fiskus.

Pajak Penghasilan Final

Salah satu jenis dari Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Final, dilansir dari laman DDTC News, Pajak Penghasilan Final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan, dipungut seketika membuat penghasilan yang telah dikenakan

PPh Final ini tidak diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Setiawan dan Fitriandi (2017) menjelaskan beberapa ciri PPh Final adalah semua usaha dianggap memiliki laba; besaran laba kotor atau margin laba sudah ditentukan; secara umum tidak menggunakan tarif progresif meskipun ada pengenaan tarif progresif untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final; dan pengenaan PPh ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Presumptive Tax

Pengenaan pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu *standard* (umum) dan *presumptive tax* (dugaan). Dalam sistem *standard* (umum), perpajakan terhadap UMKM diperlakukan sama dengan pelaku usaha lain. Beberapa negara yang menerapkan model standar pada perpajakan UMKM biasanya tergolong dalam negara-negara maju, yang sebagian besarnya memiliki sistem administrasi yang tinggi serta memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan tata buku dalam pelaksanaan usahanya (Ibrahim, 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut, Thuronyi (2003, dikutip dalam Wijaya & Arumningtias, 2021) menjelaskan bahwa beberapa sistem pajak di negara maju seperti Amerika Serikat tidak menggunakan *presumptive taxation*. Namun, berbeda dengan beberapa negara berkembang, dimana di negara tersebut sebagian besar pembayar pajaknya termasuk dalam golongan yang tidak mudah untuk dipungut pajaknya atau *hard to tax*, sehingga beberapa negara tersebut cenderung menggunakan sistem *presumptive tax*. Dalam sistem ini, penghitungan PPh akan menggunakan presumsi keadaan dari wajib pajak. Sistem

ini juga digunakan ketika suatu usaha belum mempunyai kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi operasi usahanya.

Menurut Sukaryo & Oktavia (2016) menjelaskan bahwa penerapan dari metode *presumptive tax* ini adalah sebagai bentuk penyederhanaan untuk WP saat menjalankan kewajibannya maupun untuk pemerintah (DJP) saat mengawasi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 4 ayat 2 UU PPh dan kondisi dimana WP terdaftar memiliki jumlah yang relatif sedikit serta DJP yang masih memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Penggunaan metode *presumptive* dalam penghitungan PPh tidak memakai dasar pengenaan pajak yang sebenarnya atau tidak berdasarkan jumlah pengenaan pajak secara umum, namun berdasarkan pada ukuran dan faktor lain untuk memperkirakan jumlah dasar pengenaan pajaknya (Yitzhaki, 2007 dikutip dalam Wijaya & Arumningtias, 2021). Implementasi dari metode ini berkaitan erat dengan bidang yang tidak mudah dalam pemungutan pajaknya atau *hard to tax*, sebab penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh sektor tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak dapat teridentifikasi (DDTC News, 2020 dikutip dalam Wijaya & Arumningtias, 2021).

Menurut Thuronyi (2004, dikutip dalam Wijaya & Arumningtias, 2021), terdapat beberapa faktor yang menjadikan UMKM masuk dalam sektor yang sulit untuk dipajaki, yakni jumlah dari UMKM itu sendiri yang sangat banyak sehingga sangat sulit untuk diteliti secara mendetil sebagian kecil dari mereka; pendapatan yang diperoleh tidak cukup besar; sebagian besar barang dijual secara eceran sehingga dalam hal

pelaksanaan penagihan pajak atas penghasilan tersebut tidak dapat menggunakan aplikasi pemotongan oleh pihak ketiga; bisnis yang tidak memaksa untuk melakukan penyelenggaraan pembukuan yang memadai; dan tidak adanya pengawasan sehingga membuat penghasilan atas usaha tersebut dapat disembunyikan dengan mudah.

Kepatuhan Wajib Pajak

James & Alley (2002, dikutip dalam Marfiana, 2019) menyatakan kepatuhan pajak sebagai kehendak atau keinginan tanpa paksaan dari setiap wajib pajak untuk patuh terhadap setiap aturan hukum dan administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya tindakan penegakan hukum. Sehubungan dengan itu, Devano dan Rahayu (2006, dikutip dalam Indrawan & Binekas, 2018) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat terbagi menjadi dua kriteria yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal merupakan suatu cerminan dari kondisi Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang meliputi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPT miliknya dengan tepat waktu, lengkap, dan benar, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban formal (Utara, 2011). Kepatuhan material merupakan suatu cerminan dari kondisi Wajib Pajak yang secara substantive

memenuhi semua ketentuan material meliputi nilai-nilai atau jumlah pajak yang dibayar dalam penyampaian atau pelaporannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan artinya Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Utara, 2011). Sehubungan dengan hal itu, perbedaan antara kepatuhan formal dan material juga dikemukakan menurut DJP dalam (Marfiana, 2019) yakni kepatuhan formal berhubungan dengan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, sedangkan kepatuhan material adalah jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

Sebagai wajib pajak yang patuh dan tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya indikator-indikator yang melingkupinya. Indikator-indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur suatu kepatuhan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusdita (2017, dikutip dalam Nurkumalasari et al., 2020) bahwa indikator dari kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak; kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak; kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak; kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Masa; wajib pajak patuh untuk menyerahkan SPT Tahunan; wajib pajak patuh untuk melunasi pajak; dan wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Menurut Nasucha (dikutip dalam Nurkumalasari et al., 2020) bahwa indikator dari kepatuhan adalah wajib pajak patuh untuk mendaftarkan diri; patuh dalam hal mengumpulkan kembali SPT; patuh dalam hal menjumlah dan pelunasan pajak yang

terutang; dan patuh perihal melunasi utang pajak yang ada.

Business Development Service (BDS) untuk UMKM

Dilansir dari *website* Direktorat Jenderal Pajak yakni pajak.go.id, dijelaskan bahwa *Business Development Service* (BDS) merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melayani dan mengawasi wajib pajak terutama wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembinaan pengembangan usahanya termasuk pemberian penyuluhan terkait perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) (Debbianto, 2019).

Sehubungan dengan itu, Putri et al. (2014) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa *Business Development Service* (BDS) merupakan jasa *non financial* yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan kemampuan suatu perusahaan dalam bersaing. Menurut Soetrisno (2002, dikutip dalam Kartika Putri et al, 2014), terdapat beberapa layanan yang diberikan *Business Development Service* kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yakni meliputi kegiatan layanan informasi, konsultasi, pelatihan, melakukan bimbingan atau pendampingan dan menyelenggarakan kontak bisnis serta fasilitasi dalam memperluas pasar, memperoleh permodalan, pengembangan organisasi dan manajemen, pengembangan teknologi, serta penyusunan proposal pengembangan usaha. Menurut Putri et al. (2014) dalam jurnalnya juga mengemukakan bahwa terdapat indikator peran *Bussines Development Service* (BDS) yakni pemberian layanan pendampingan akses permodalan; pemberian layanan

pemanfaatan teknologi; pemberian layanan pemasaran; dan pemberian layanan pendampingan manajemen.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawati (2019) yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No.23 Tahun 2018 dalam rangka peningkatan penerimaan PPh Final pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus baik melalui media sosial maupun secara langsung, kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, perubahan tarif juga berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu kesadaran masyarakat yang belum tinggi, kesulitan wajib pajak dalam membuat kode billing, dan perbedaan usia dan tingkat pendidikan wajib pajak yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham & Hiktaop (2019) yang bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak UKM di lingkungan KPP Pratama Merauke setelah penerapan penurunan tarif pajak. Dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak setelah PP No.23 Tahun 2018 diterapkan, berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak non karyawan atau pemilik UKM, hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan realisasi penyampaian SPT dan jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2018 dari tahun sebelumnya yakni 2017.

Berdasarkan penelitian oleh Ratri (2019) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari setelah berlakunya PP No.23 Tahun 2018, serta

kontribusi penerimaan pajak PP No.23 Tahun 2018 terhadap penghasilan final di KPP Pratama Semarang Candisari, disimpulkan bahwa penerapan PP No.23 Tahun 2018 belum memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dijelaskan dalam tulisannya bahwa terjadi peningkatan wajib pajak terdaftar namun tidak diimbangi dengan jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu, kurangnya kesadaran wajib pajak juga berpengaruh. Namun, disamping itu penerimaan Pajak Penghasilan Final PP No.23 Tahun 2018 selalu meningkat meski tarifnya turun, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan dasar pengenaan pajak berupa peredaran bruto wajib pajak terdaftar, penambahan wajib pajak terdaftar juga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak PP No.23 Tahun 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meikathi & Kasetyaningsih (2019) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di wilayah Kota Surakarta, disimpulkan bahwa penerapan PP No.23 Tahun 2018 yang menjadikan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori yang relevan dan dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data terkait penulisan ini adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Metode studi kepustakaan dilaksanakan

dengan memperoleh dasar teoritis dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel, *website*, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Sedangkan metode studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan dari KPP Pratama Malang Utara, selain data yang telah dikumpulkan dilakukan juga kegiatan wawancara untuk menunjang serta menambah penjelasan dari pembahasan ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai KPP Pratama Malang Utara.

Metode studi lapangan dilakukan penulis dengan cara wawancara dan permintaan data terkait pembahasan ini di KPP Pratama Malang Utara. Metode wawancara adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung dan menunjang kelengkapan serta kejelasan selain dari data-data yang telah dikumpulkan terkait isi dan pembahasan. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pegawai yang bekerja di KPP Pratama Malang Utara yang masing-masingnya merupakan *Account Representative* (AR) dan Seksi Ekstensifikasi di KPP setempat serta salah satu wajib pajak UMKM. Kegiatan wawancara ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan media sosial berupa *WhatsApp* mengingat kondisi pandemi yang tengah terjadi saat ini sehingga tidak dapat dilakukan dengan tatap muka langsung serta merupakan hasil kesepakatan bersama dan telah mendapat persetujuan dari narasumber sendiri, dan ada juga yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan bersama.

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mengajukan permohonan untuk meminta beberapa data yang diperlukan

dalam tulisan ini melalui media eriset yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ditujukan kepada KPP Pratama Malang Utara, hal ini juga dilakukan mengingat kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Metode studi kepustakaan dilakukan penulis dengan cara memperoleh dasar teoritis dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel atau *website* yang dapat penulis temukan di internet serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di kantornya, KPP Pratama Malang Utara memiliki beberapa program yang dilakukan dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan dalam menerapkan PP No.23 Tahun 2018 di KPP Malang Utara adalah meliputi kegiatan sosialisasi termasuk kunjungan ke tempat wajib pajak, pengawasan, dan pembinaan.

Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi kerap dan intensif dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Utara, dalam hal ini adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait PP No.23 Tahun 2018. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPP sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Salah satu arahan dari KPDJP adalah sosialisasi bagi calon wajib pajak maupun wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria

wajib pajak PP No.23 Tahun 2018. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut pun tidak hanya berkaitan dengan penurunan tarif 0,5% nya saja tetapi juga terkait dengan kewajiban lainnya mulai dari pendaftaran, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya serta diberikan juga edukasi terkait manfaat dari pajak itu sendiri.

Materi yang disampaikan oleh KPP Pratama Malang Utara dalam kegiatan sosialisasi terkait PP No.23 Tahun 2018 telah disusun terlebih dahulu oleh bagian P2Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dengan *template* yang telah disiapkan juga, sehingga pihak KPP tinggal meneruskan dan menyampaikan materi tersebut dalam sosialisasinya. Terdapat beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Utara, baik secara *offline* maupun *online* dengan memanfaatkan media yang ada. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukannya adalah media sosial, sosialisasi saat pendaftaran, *Business Development Service* (BDS), penyuluhan kepada wajib pajak, kelas pajak, kunjungan ke tempat wajib pajak,

Melalui media sosial, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Utara seperti *Youtube*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*. Penjadwalan dari kegiatan sosialisasi melalui media sosial ini tidak menentu sebab dilihat lagi ke konten yang memang dibutuhkan untuk disampaikan ke wajib pajak itu sendiri atau terdapat konten dari kantor pusat yang harus diteruskan oleh pihak KPP Pratama Malang Utara.

Sosialisasi saat pendaftaran, sosialisasi ini dilakukan saat wajib pajak melakukan pendaftaran diri, pada saat pendaftaran diri pertama kali bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dalam PP 23 akan dilihat oleh petugas seperti apa model

usahnya kemudian hal-hal terkait usahanya seperti penjualannya, setelah itu pihak KPP Pratama Malang Utara akan mengirimkan surat kepada wajib pajak yang bersangkutan dan disampaikan terkait dengan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, biasanya saat wajib pajak tersebut mendaftarkan diri maka akan langsung dijelaskan mengenai kewajibannya bahwa sebesar 0,5% dari omset bulanannya harus disumbangkan ke kas negara serta kewajiban lainnya, termasuk pelaporannya nanti yang harus disampaikan ke kantor pajak.

Business Development Service (BDS), program ini merupakan program dari kantor pusat yang kemudian diteruskan ke KPP. Sosialisasi melalui program *Business Development Service* (BDS) ini dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara dengan tujuan untuk memfasilitasi wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta memberikan penyuluhan terkait peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, disamping itu diberikan juga sosialisasi terkait kewajiban perpajakannya bahwa terdapat kewajiban sebesar 0,5% dari omset usahanya yang harus dibayarkan ke negara. Sebelum terjadi pandemi, KPP Pratama Malang Utara biasanya melakukan program *Business Development Service* (BDS) dengan mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di kantor. Kemudian setelah itu para pelaku UMKM dipersilahkan untuk membuat semacam tempat jualan di kantor untuk berjualan dan memperkenalkan produknya serta melakukan promosi produknya kepada pegawai kantor sendiri maupun para wajib pajak yang datang untuk mengurus keperluan pajaknya. Sehingga pada intinya program BDS ini

adalah disamping untuk pemberian edukasi terkait bagaimana cara untuk mengembangkan usahanya, disisi lain juga diberikan sosialisasi terkait perpajakan. Terkait jadwal dilakukannya program *Business Development Service* (BDS) di KPP Pratama Malang Utara ini biasanya dilakukan dua kali sesuai dengan target yang telah diberikan oleh kantor pusat kepada KPP, jadi kantor pusat yang menentukan harus berapa kali melakukan program ini. Biasanya di setiap semester akan dilakukan sekali, namun untuk jadwal kapan akan dilakukannya, hal itu diserahkan kembali ke pihak KPP untuk melakukannya baik di awal ataupun akhir semester.

Penyuluhan kepada wajib pajak, sosialisasi juga dilakukan melalui penyuluhan kepada para wajib pajak. Sebelum terjadinya pandemi, kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan mengirimkan SMS *blast* untuk menyasar wajib pajak yang sesuai dengan kriteria seperti UMKM, kemudian akan disampaikan kepada wajib pajak bahwa akan dilaksanakan kelas pajak di waktu yang telah ditentukan sebelumnya serta dipersilahkan kepada wajib pajak untuk ikut menghadiri kegiatan tersebut. Namun, setelah terjadinya pandemi kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara registrasi melalui *WhatsApp* yang telah disediakan oleh KPP, kemudian setelah wajib pajak melakukan registrasi dan konfirmasi, para wajib pajak akan dipersilahkan untuk datang ke kantor dengan tetap menjalankan protokol yang berlaku. Lalu, akan dilakukan tiga sesi kegiatan yakni pemberian informasi terkait perpajakan, sesi tanya jawab, dan sesi *feedback* yang dilakukan melalui kuis dengan *quiziz* ataupun *kahoot*.

Kelas pajak, sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan kelas pajak, kelas

pajak adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan edukasi terkait dengan hal-hal perpajakan kepada para wajib pajak. Jadwal kegiatan untuk kelas pajak sendiri diatur oleh pihak KPP dan bukan dari kantor pusat, sehingga terkait penjadwalan kegiatannya diserahkan kembali ke masing-masing KPP. Materi yang disampaikan melalui kelas pajak ini sifatnya beragam, sehingga tiap pertemuannya akan membahas materi yang berbeda baik yang terkait dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk UMKM, peraturan-peraturan terbaru maupun hal-hal perpajakan lainnya. Pada KPP Pratama Malang Utara, kelas pajak rutin dilakukan setiap minggu terutama saat sebelum terjadinya pandemi. Bagi wajib pajak UMKM yang baru mendaftarkan diri, saat melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di loket TPT, wajib pajak kemudian akan langsung diarahkan ke petugas *helpdesk* untuk memperoleh sosialisasi terkait PP 23 tahun 2018. Selain itu, biasanya pihak KPP akan mengirimkan SMS *blast* kepada para wajib pajak UMKM untuk dapat ikut atau hadir dalam kegiatan kelas pajak dengan waktu dan tempat yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak KPP Pratama Malang Utara. Kelas pajak secara *offline* ini biasanya dilakukan dengan tatap muka di loket khusus yang telah disediakan, wajib pajak akan diberikan pamflet PP No.23 Tahun 2018 dan contoh daftar rekap peredaran bruto per bulan, kemudian wajib pajak akan dijelaskan tata cara menghitung, menyetor hingga kewajiban lapor pajak. Jika wajib pajak merasakan adanya kesulitan atau kurang jelas saat pemaparannya, wajib pajak bisa langsung menyampaikan pada saat tatap muka tersebut. Setelah terjadinya pandemi, pendaftaran NPWP langsung di loket TPT

ditiadakan sehingga wajib pajak akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui *e-registration* untuk nantinya dapat mengikuti kelas pajak secara online melalui *zoom*, dengan pamflet-pamflet PP 23 tahun 2018 yang telah disebarakan melalui media sosial seperti *Instagram*. Cara lainnya adalah dengan menggunakan SMS *blast* dan pendaftaran melalui link *bit.ly* yang kemudian akan diarahkan ke WhatsApp milik seksi ekstensifikasi KPP Pratama Malang untuk dapat mengikuti kelas pajak.

Kunjungan ke tempat wajib pajak, sosialisasi juga dilakukan melalui kunjungan ke tempat wajib pajak berada. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan salah satunya yakni mengklarifikasi kesesuaian kewajiban perpajakan wajib pajak atau kegiatan *profiling* wajib pajak. Khusus untuk wajib pajak PP No.23 Tahun 2018 biasanya kunjungan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara disertai dengan sosialisasi kewajiban PP No.23 Tahun 2018 dilakukan bersamaan dengan kegiatan ekstensifikasi atau dikenal dengan kegiatan sisir sentuh. Karena sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku usaha UMKM, maka petugas pajak tidak hanya menghimbau perihal pendaftaran NPWP namun juga melakukan sosialisasi kewajiban PP No.23 Tahun 2018 di masing-masing lokasi usaha wajib pajak disertai dengan surat tugas kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD). KPP Pratama Malang Utara juga pernah melakukan kunjungan ke kluster usaha wajib pajak dengan menggandeng pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk mensosialisasikan pajak pusat dan pajak daerah. Namun, kegiatan kunjungan ini dilihat kembali ke potensi wajib pajak sendiri, jika dirasa potensi yang dimiliki yang tidak terlalu besar maka pihak

KPP biasanya akan melakukan korespondensi melalui *WhatsApp*.

Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara biasanya dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria dalam PP No.23 Tahun 2018 dan belum pernah melaksanakan kewajiban perpajakannya padahal diketahui terdapat kegiatan usaha atau data yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat objektif, wajib pajak yang tidak rutin melakukan pembayaran PP No.23 Tahun 2018 atau penyetoran PP No.23 Tahun 2018nya.

Terdapat suatu skema yang biasanya dilakukan dalam kegiatan pengawasan ini, yakni pihak KPP menerbitkan surat himbauan terkait pemberitahuan kewajiban PP No.23 Tahun 2018 atau melalui SMS *blast* yang dikirimkan untuk mengingatkan wajib pajak terkait kewajibannya. Apabila wajib pajak membutuhkan bantuan untuk menunaikan kewajibannya, pihak KPP telah menyediakan nomor telepon AR (*account representative*) yang mengampu wajib pajak tersebut atau nomor telepon *helpdesk*. Sehingga nanti wajib pajak tersebut dapat menghubungi nomor telepon yang ada untuk melakukan konsultasi, wajib pajak juga dapat melakukan konsultasi melalui *WhatsApp* lewat nomor telepon tersebut. Jika diperlukan, petugas akan mengirimkan contoh pengisian rekap omset jika diperlukan.

Pembinaan

Kegiatan pembinaan ini sendiri biasanya dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penerbitan surat himbauan serta kunjungan ke tempat wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara. Sehingga di

setiap kegiatan yang dilakukan tersebut, wajib pajak juga diberikan pembinaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Khusus untuk wajib pajak UMKM diberikan juga pembinaan terkait kewajiban PP No. 23 Tahun 2018nya serta kewajiban dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya.

Selama penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Utara ini, ternyata terdapat kendala yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua narasumber, kendala yang terjadi adalah tidak semua wajib pajak memiliki pencatatan atas omset per bulan, lalu ada juga wajib pajak yang tidak bisa membedakan antara omset dengan penghasilan bersih, serta kesulitan pembuatan kode billing untuk PP 23 apabila pembayarannya dilakukan per bulan sesuai ketentuan, sehingga para wajib pajak rata-rata melakukan pembayarannya setahun sekaligus bersamaan dengan laporan SPT tahunan.

Namun, meskipun begitu adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan lebih gencar melakukan sosialisasi tadi, kemudian perlu adanya kerjasama antar KPP, Kantor Pusat, wajib pajak sendiri dan juga Pemerintah Daerah setempat agar dapat bekerjasama untuk melakukan sosialisasi tersebut, sehingga nantinya sosialisasi tidak hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu seperti Maret atau April saja tapi harus terus dilakukan setiap bulan. Wajib pajak juga dapat memberikan bantuannya dengan sering mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan baik kelas pajak ataupun lainnya.

Selain itu, melalui sosialisasi tadi juga perlu diberikan pemahaman lebih kepada wajib pajak tentang apa itu omset dan

pemberian contoh riilnya. Pemberian rekap peredaran bruto untuk diisi oleh wajib pajak setiap bulan agar tidak lupa melakukan pencatatan atas omset. Kemudian untuk wajib pajak yang masih muda, perlu diberikan edukasi terkait tata cara pembuatan billing melalui *djp online*, sedangkan untuk wajib pajak yg sudah tua, maka dapat diberikan layanan melalui *WhatsApp* untuk meminta kode billing setiap bulannya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Salah satu kriteria dari kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan material, kepatuhan material merupakan kepatuhan yang mencakup hal-hal terkait nilai-nilai atau jumlah pajak yang dibayar dalam pelaporannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga secara umum perbedaannya dengan kepatuhan formal adalah kepatuhan material lebih berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sedangkan kepatuhan formal berkaitan dengan kepatuhan penyampaian SPTnya dengan lengkap dan benar sesuai waktu dan aturan yang berlaku.

Selain itu, salah satu indikator yang dapat dilihat dari kepatuhan perpajakan juga adalah kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajaknya atau kepatuhan pembayaran utang pajaknya. Sehingga analisis tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya di KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari KPP Pratama Malang Utara, diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM dengan omset kurang dari 4,8 miliar

setahun menggunakan PPh final dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 420, artinya wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajak dengan PPh Final kode Jenis Setor 420 (untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) dan kode MAP 411128. Data pembayaran pajak dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Presentase Target dan Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Uraian	Target	Realisasi
2017	Tingkat Kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%
2018	Kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%
2019	Kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	60%	62,08%
	Tingkat Kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	70%	72,52%

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Tabel 3. Jumlah Pembayaran Pajak dari Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran	Nominal
2016	3.603	13.589.234.252
2017	4.950	18.947.976.799
2018	5.676	16.369.305.922
2019	4.676	8.083.205.251
2020	3.202	4.837.422.701

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan data pembayaran tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak adalah sebanyak 3.603 wajib pajak dengan nominal sebesar Rp13.589.234.252, ditahun 2017 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran adalah 4.950 dengan nominal sebesar Rp18.947.976.799, kemudian ditahun

selanjutnya tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran adalah 5.676 dengan nominal Rp16.369.305.922, lalu di tahun 2019 jumlah yang melakukan pembayaran adalah 4.676 dengan nominal Rp8.083.205.251, kemudian pada tahun 2020 jumlah yang bayar adalah 3.202 dengan nominal sebesar Rp4.837.422.701. Selain itu, dari data tersebut juga kita dapat menghitung peningkatan atau penurunan yang terjadi tiap tahunnya.

Tabel 4. Jumlah Pembayaran Pajak WP UMKM di KPP Pratama Malang Utara

Tahun	Jumlah WP Melakukan Pembayaran	Nominal	% perubahan
2016	3,603	13,589,234,252	
2017	4,950	18,947,976,799	39%
2018	5,676	16,369,305,922	-14%
2019	4,676	8,083,205,251	-51%
2020	3,202	4,837,422,701	-40%

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Malang Utara

Dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan dalam jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 39% dari tahun 2016, ini menunjukkan bahwa sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran semakin baik. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya akan tetapi jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran semakin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula pada tahun selanjutnya yakni di tahun 2019 terjadi penurunan dengan nilai yang cukup besar yakni 51% dibanding tahun 2018, pada tahun selanjutnya yakni di tahun 2020 penurunan jumlah nominal pembayaran kembali terjadi yakni sebesar 40% dibanding tahun 2019. Dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2018 pun jumlah wajib pajak UMKM

yang melakukan pembayaran juga semakin menurun.

Dapat kita ketahui bersama bahwa PP No.23 Tahun 2018 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli Tahun 2018, dengan demikian berdasarkan grafik yang disajikan dalam Gambar 1 dibawah, maka dapat kita lihat perbandingan yang terjadi dalam jumlah WP yang melakukan pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.23 Tahun 2018. Sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018, terlihat bahwa jumlah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan pembayaran mengalami peningkatan, kemudian pada tahun selanjutnya dimana setelah PP No.23 Tahun 2018 diterapkan dapat terlihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan yang cukup besar, namun pada tahun-tahun selanjutnya jumlah tersebut terus mengalami penurunan.

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Malang Utara

Gambar 1. Perbandingan Jumlah WP Yang Melakukan Pembayaran

Meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2018 saat PP No.23 Tahun 2018 diterapkan, hal ini tidak sejalan dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan sebelum dan

sesudah PP No.23 Tahun 2018 diberlakukan disajikan dalam Gambar 2 di bawah. Dapat terlihat bahwa sebelum tahun 2018 jumlahnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 jumlahnya mengalami penurunan, lalu kemudian dalam dua tahun selanjutnya yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah pajak yang dibayarkan pun terus mengalami penurunan.

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Malang Utara

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pajak Yang Dibayarkan

Berkaitan dengan penurunan-penurunan yang terjadi tersebut, menurut penulis dengan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan narasumber, penurunan yang terjadi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni ketidaktauan wajib pajak UMKM terkait perubahan peraturan yang terjadi, kebanyakan wajib pajak UMKM belum mengetahui tentang peraturannya dan seperti apa penerapan dari peraturan tersebut sehingga hal tersebut juga menjadi kemungkinan penyebab terjadinya penurunan dari jumlah pajak yang dibayarkan; ketidaktauan wajib pajak UMKM terkait dengan pembuatan kode billing, ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui pembuatan kode billing sehingga hal ini juga yang menjadi kendala dalam

penerapan PP No.23 Tahun 2018; penurunan dari jumlah pajak yang dibayarkan juga dapat terjadi karena memang adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%, ditambah adanya pemberian insentif pajak kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada masa pandemi, sehingga hal itu tentu saja akan berpengaruh pada jumlah pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil; pelanggaran yang disebabkan oleh wajib pajak UMKM itu sendiri, bahwa masih ada yang melanggar saat penerapan PP No.23 Tahun 2018 ini, serta kesadaran dari WP sendiri yang masih kurang; dalam dua tahun terakhir yakni pada tahun 2019 dan 2020, pengaruh dari pandemi yang terjadi juga dapat menjadi penyebab adanya penurunan tersebut, sebab dapat diketahui bersama bahwa pada tahun 2019 dan 2020 penyebaran virus covid-19 sangat pesat dan hal itu pun berdampak besar pada sektor UMKM, dimana kita tahu sendiri bahwa saat pandemi terjadi banyak UMKM yang sangat kesulitan untuk menjalankan usahanya bahkan tidak sedikit juga yang harus menutup usahanya, sehingga hal tersebut juga dapat berdampak pada penerimaan pajak sektor UMKM sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan *Account Representative* KPP setempat, adapun wajib pajak yang melanggar saat PP No.23 Tahun 2018 ini diterapkan yakni wajib pajak yang dalam satu tahun pajaknya sudah mempunyai omset di atas 4,8 miliar, maka sesuai ketentuan wajib pajak baru boleh menggunakan PPh 25 pada tahun berikutnya. Tetapi di tahun yang bersangkutan WP tiba-tiba menggunakan PPh 25 karena dianggap lebih menguntungkan, pajak yang terutang lebih kecil karena mempertimbangkan unsur biaya atau alasan lain karena ketidaktahuan WP bahwa PPh 25 baru berlaku untuk tahun berikutnya. Terkait hal tersebut pihak KPP

melalui *Account Representative* (AR) akan menerbitkan surat himbauan agar WP melakukan pembetulan; dan wajib pajak melakukan pekerjaan bebas namun pajaknya dibayar dengan skema PP No.23 Tahun 2018, terkait hal ini *Account Representative* (AR) juga akan menerbitkan himbauan apabila diperoleh data yang valid atas pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang ada serta analisa diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa setelah diterapkannya PP No.23 Tahun 2018 ini ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara terutama dalam membayar pajaknya, sebab masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui bahkan ada yang melanggar peraturan tersebut. Tidak hanya itu saja, kondisi yang terjadi setelah penerapan peraturan tersebut juga ikut berpengaruh, sebab melihat kembali dengan kondisi yang terjadi setelah PP No.23 Tahun 2018 tersebut diterapkan bahwa terjadi pandemi di tahun setelah diterapkannya peraturan tersebut, yang mana dampaknya sangat besar terhadap sektor UMKM itu sendiri dan tentu saja akan sangat berpengaruh pada penerimaan pajaknya.

Kontribusi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak UMKM

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu termasuk kedalam jenis pengenaan pajak final, sehingga pengenaan pajak tersebut tentu saja memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak final, dalam hal ini adalah kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final di KPP

Pratama Malang Utara. Kontribusi tersebut dapat terlihat dari realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak final, realisasi tersebut juga tidak lepas dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 5. Tingkat Realisasi Penerimaan PPh Final di KPP Pratama Malang Utara

Tahun	Target Penerimaan PPh Final (Total KJS)	Realisasi Penerimaan PPh Final (Total KJS)	(%)
2016	191,588,113,233	93,612,314,403	49%
2017	108,513,787,000	98,965,213,018	91%
2018	187,440,132,000	114,685,108,714	61%
2019	140,060,600,000	110,483,908,884	79%
2020	161,991,711,000	94,575,243,292	58%

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Malang Utara

Tabel 4 di atas menyajikan presentase realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Final di KPP Pratama Malang Utara. Dapat terlihat bahwa presentase realisasi dalam waktu 5 tahun tersebut bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 sebelum PP No.23 Tahun 2018 berlaku terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan PPh Final yakni sebesar 98%, namun di tahun selanjutnya yakni pada tahun 2018 diberlakukan, realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 61%. Tahun 2019 realisasi penerimaan kembali meningkat sebesar 79% dan di tahun berikutnya 2020 realisasi tersebut kembali menurun sebesar 58%. Realisasi penerimaan tersebut tidak terlepas dari penerimaan pajak final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga memberikan kontribusi dalam total penerimaan pajak final di KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 6. Presentase Penerimaan Pajak Final dari WP UMKM Terhadap Total Realisasi Penerimaan PPh Final di KPP Pratama Malang Utara

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh Final (Total KJS)	Penerimaan KJS 420 (PPH FINAL WP UMKM)	(%)
2016	93,612,314,403	16,246,004,663	17%
2017	98,965,213,018	18,971,874,943	19%
2018	114,685,108,714	16,432,800,767	14%
2019	110,483,908,884	13,136,340,039	12%
2020	94,575,243,292	7,704,508,405	8%

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Malang Utara

Kontribusi penerimaan pajak final dari wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disajikan dalam Tabel 5 di atas. Dapat Terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020, presentase dari kontribusi penerimaan pajak final dengan Kode Jenis Setoran (KJS) 420 atau pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 penerimaan pajak final dari wajib pajak UMKM tersebut sebesar 19% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya di tahun 2016. Namun, pada tahun 2018 yakni tahun sejak PP No.23 Tahun 2018 diberlakukan presentase tersebut terus menurun hingga tahun 2020 sehingga presentase kontribusi pada tahun sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 ini lebih besar dibandingkan tahun setelah diterapkannya.

Penurunan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti salah satunya adalah dampak dari pandemi covid-19 yang berpengaruh besar terhadap sektor UMKM serta beberapa hal lainnya yang ada pada

pembahasan sebelumnya. Namun, meskipun demikian dapat dipastikan bahwa dari realisasi total penerimaan pajak final tersebut, sebagian besarnya juga berasal dari penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM sehingga kontribusi dari penerimaan pajak UMKM ini memiliki peran yang penting dalam total penerimaan pajak final di KPP Pratama Malang Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Malang Utara dilakukan melalui beberapa program yakni meliputi kegiatan sosialisasi, kegiatan pengawasan, dan kegiatan pembinaan. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa bentuk seperti sosialisasi lewat media sosial, kegiatan penyuluhan perpajakan, kegiatan *Business Development Service* (BDS), dan kelas pajak. Kegiatan Pengawasan dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan atau mengirimkan SMS *blast* kepada wajib pajak untuk mengingatkan WP atas kewajibannya. Kegiatan pembinaan dilakukan bersamaan dengan sosialisasi ataupun pengawasan dengan menerbitkan surat himbauan atau kunjungan ke tempat wajib pajak untuk memberikan pembinaan terkait perpajakannya.

Penerapan PP No.23 Tahun 2018 tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara, dalam hal ini kepatuhan pembayaran pajaknya. Bahwa ternyata di tahun-tahun setelah diterapkan, jumlah wajib pajak ataupun jumlah pajak yang dibayarkan terus mengalami penurunan, berbeda dengan sebelum penerapannya yang masih terjadi peningkatan sebelumnya. Masih ada beberapa WP yang belum mengetahui peraturan tersebut dan masih ada pelanggaran yang dilakukan, serta kurangnya

kesadaran dari WP sendiri. Kondisi yang terjadi setelah peraturan tersebut diterapkan juga berpengaruh terhadap penurunan tersebut, yakni adanya pandemi covid-19 yang berdampak besar pada UMKM.

Realisasi dari penerimaan total pajak final di KPP Pratama Malang Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Penerimaan total PPh Final ini tidak lepas dari kontribusi pajak final dari WP UMKM, terdapat perbedaan dalam kontribusi pajak final WP UMKM sebelum dan sesudah PP No.23 Tahun 2018 ini diterapkan. Sebelum penerapannya kontribusi di tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, namun di tahun selanjutnya setelah peraturan telah diterapkan persentase kontribusi tersebut menurun hingga tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, Y. S., & Sulaksono, A. G. (2019). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019*.
- Cahyani, L. P., & Noviri, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Cermati.com. (2020, Februari). *Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*. Retrieved from Cermati.com: <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Pajak%20adalah%20pungutan%20wajib%20dari,maupun%20daerah%20demi%20kesejahteraan%20masyarakat>.
- Consulting, M. (2019, May 2). *Kontribusi UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from MUC Consulting: <https://mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>

- Consulting, M. (2019, Mey 23). *MUC Consulting*. Retrieved from Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak: <https://www.mucglobal.com/id/news/567/perkembangan-realisasi-penerimaan-pajak-2010-2018>
- Debbianto, A. R. (2019, Juni 14). *Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku*. Retrieved from djp: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kep-atuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (n.d.). *Data UMKM Se 2016 dan SUTAS 2018 PLUS TK*. Retrieved from Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur: <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Fitriandi, P., & Setiawan, B. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, S. (2013). *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Retrieved from Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal: http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf
- Ilham, M., & Hiktaop, K. (2019). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Musamus Accounting Journal*.
- Indonesia, P. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia.
- Indonesia, P. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan . Indonesia.
- Indonesia, P. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Indonesia.
- Indonesia, P. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Indonesia.
- Indonesia, P. (2019). *Informasi APBN 2019 APBN Untuk Mendorong Investasi Dan Daya Saing Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Informasi APBN*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2013). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013*. Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: http://www.depkop.go.id/uploads/txt/tgfiles/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). *Perkembangan Data Usaha*

- Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Januari 8). *Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II).
- Marfiana, A. (2019). Tren kepatuhan pajak pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.
- Mukhlis, I. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.
- Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nurkumalasari, A. D., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* Volume 2/Nomor 2/Januari 2020 Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako.
- Pajak, D. J. (2019). *Laporan Pelaksanaan Workshop UMKM Patriot Untuk Negeri 2019*.
- Putri, K., Pradhanawarti, A., & Prabawani, B. (2014). Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur) . *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Ratri, F. ' (2019). Tinjauan Atas Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Sukaryo, & Oktavia. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Indonesia dengan Menggunakan Gain/Loss. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*.
- Utara, A. S. (2011). *Modul pengantar hukum pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing The Potential Tax Avoidance In Government Regulation of The Republic of Indonesia Number 23 of 2018. *Multicultural Education*.